



# Informasi Strategis

**Jumat, 22 Januari 2021**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat  
Gedung AH Nasution Lt. 14

**BIDANG DALAM NEGERI**

**Pembangunan Sarana dan Prasarana Terdampak Bencana di Kalsel oleh TNI**

1

FAKTA

Pada tanggal 20 Januari 2021, Kementerian PUPR dibantu Den Zipur 8/Gawi Manuntung Kodam VI/Mulawarman dan Kodim 1009 Pelaihari telah menyelesaikan jembatan Bailey sebagai pengganti jembatan Tabunio II yang roboh akibat banjir tanggal 14 Januari 2021 lalu. Jembatan Bailey yang terpasang mempunyai panjang 18 meter, lebar 3,5 meter dengan kapasitas beban maksimal sekitar 40 ton. Sementara pada hari yang sama, Satgas Penanggulangan Banjir Korps Marinir TNI AL dari Yonkomlek 1 Mar, memasang dan menginstal *repeater* untuk mendukung kelancaran komunikasi para personel Satgas dalam setiap pergerakan yang dilaksanakan di salah satu tower komunikasi yang berada di Markas Denzipur 8/GM, Jl. Ahmad Yani Km.30,5, Banjarbaru, Kalsel.

**TINGKAT KEPENTINGAN KABUPATEN/KOTA**



**TINGKAT KEPENTINGAN PROVINSI**



**TINGKAT KEPENTINGAN NASIONAL**



2

ANALISIS

Perakitan dan pemasangan jembatan Bailey oleh TNI AD adalah upaya menghubungkan akses yang terputus sebagai alternatif sementara menunggu perbaikan jembatan Tabunio II yang berada di Kec. Takisung, Tanah Laut. Jembatan ini merupakan infrastruktur penting jalan nasional yang menghubungkan Lintas Selatan Kalsel.

Selama penanggulangan bencana banjir di Kalsel, komunikasi Satgas akan didukung oleh *tower* komunikasi di Markas Denzipur 8/GM yang dibangun Yonkomlek 1 Mar sehingga personel Satgas dapat menggunakan *Handy Talkie* (HT).

3

DAMPAK

Jalur transportasi lintas selatan Kalsel (Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin) dapat terhubung kembali dan Komunikasi Satgas Penanggulangan Bencana Banjir di Kalsel dapat dilakukan dengan lancar.

4

SARAN

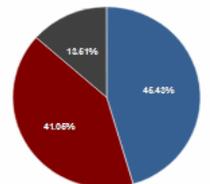
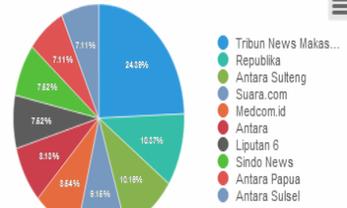
Kemhan mendukung upaya TNI dalam melaksanakan OMSP melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR, Pemda setempat, dan PLN khususnya dalam membangun infrastruktur darurat. Untuk itu, Kemhan dapat memperkuat penerapan doktrin operasi gabungan (trimatra terpadu) TNI dalam setiap kebijakannya.

**MEDIA EXPOSURE**

2.684 Berita *Online*

8.898.399 Cuitan Twitter

97 Posting Facebook

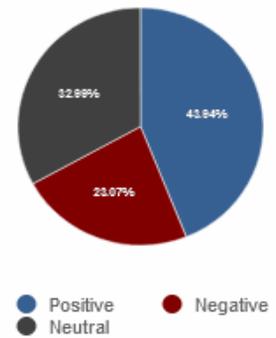


## TERORISME POSO

### EXPOSURE

102 Berita  
Lokal – nasional

301,105 Mention  
Media Sosial



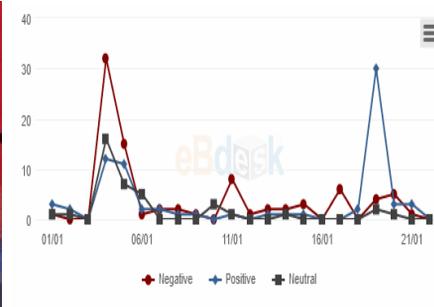
## DPR anggap strategi penanganan terorisme di Sulteng keliru

1 Anggota Komisi III DPR, Ahmad M. Ali, menyoroti penanganan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), oleh Polri. Terlebih, aparat kepolisian gagap dalam menangani persolan tersebut lantaran Kapolri, Jenderal Idha Azis, menempatkan Kapolda Sulteng, Irjen Abdul Rakhman Baso, di Desa Tokorondo, Poso, sejak Desember 2020



## 2 DAMPAK

Dengan adanya suatu koreksi dari DPR Tentang penanganan teroris akan berdampak terhadap kinerja aparat keamanan dan keamanan wilayah Sulteng



## 3 ANALISA

Polri dengan dibantu oleh TNI Sudah cukup lama dan bertahun tahun melakukan pengejaran terhadap teroris sampai saat ini belum berhasil menangkap 11 teroris di Poso, hal ini kemungkinan ada yang kurang tepat dalam penanganannya sehingga perlu adanya evaluasi secara komprehensif dan strategi baru dalam penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan guna mendapatkan hasil yang diharapkan

## 4 SARAN

Kemhan mendorong Polri dengan dibantu TNI dan BNPT untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan merancang strategi baru dalam penanganan teroris di Poso



**BIDANG ASIA PASIFIK**

## IRAN JATUHKAN SANKSI PADA DONALD TRUMP DAN PEJABAT LAINNYA

1

Kementerian Luar Negeri Iran telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat, diantaranya yakni Mantan Presiden AS Donald Trump, Mike Pompeo, dan Christopher Miller. Sanksi tersebut diberikan karena mereka dianggap mendukung tindakan teror terhadap Iran. Sanksi yang diberikan berupa larangan masuk ke Iran, pembekuan rekening bank, dan penyitaan aset.



2

**ANALISIS**

Sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah Iran tersebut merupakan tindakan balasan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang telah menerapkan banyak sanksi terhadap perusahaan dan individu yang dianggap memiliki keterlibatan dengan Iran. Namun dengan dilantikannya Presiden AS terpilih Joe Biden maka terbuka kemungkinan bahwa sanksi-sanksi tersebut akan digugurkan sebagai langkah awal AS dalam mendekati Iran. Hal ini akan membawa pengaruh yang positif terhadap stabilitas kawasan.

### INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

**DAMPAK**

Penerapan sanksi terhadap beberapa mantan pejabat AS oleh Iran tersebut disinyalir tidak akan mendapat tanggapan dari pemerintahan baru AS dan mereka akan lebih memfokuskan diri dalam upaya negosiasi pengembangan nuklir dan rudal Iran.

4

**SARAN**

Kemhan mendukung Kemlu untuk memprakarsai dialog antara Iran dengan AS di dalam forum PBB guna membahas pengembangan nuklir Iran dan kembalinya Iran-AS ke dalam kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang didukung oleh semua negara-negara penandatanganan kesepakatan tersebut.

### 1 FAKTA/DATA

# Turki Menuntut Enam Orang Tersangka Karena Menjual Informasi Rahasia Tentang Program Pertahanan.

Kepolisian Turki dan Organisasi Intelijen Nasional, atau MIT menyatakan bahwa pemerintah Turki telah menetapkan enam tersangka dalam skema dugaan penipuan yang melibatkan kontrak industri pertahanan. Penahanan tersebut dilakukan pemerintah sejak tanggal 12 Januari 2021, dimana terjadi setelah operasi rahasia yang didapat keenam tersangka didakwa menjual data rahasia dan rahasia yang berkaitan dengan program industri pertahanan. Kelima tersangka adalah agen atau perwakilan dari pabrikan pertahanan asing, yakni Emre Alp Durmaz, yang memiliki perusahaan konsultan dan merupakan putra Mehmet Durmaz, agen industri pertahanan terkemuka di Turki. Dua tersangka lainnya diidentifikasi dengan inisial mereka sebagai M.S.A., pemilik perusahaan agen, dan E.Ö, seorang karyawan di sebuah perusahaan Pertahanan. Sedangkan satu tersangka adalah mantan pejabat pengadaan. Yusuf Hakan Özbilgin yang merupakan direktur proyek di departemen sistem tak berawak dan cerdas dari badan pengadaan Turki, Presidensi Industri Pertahanan.

### INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



### 2

### ANALISA

penetapan tersangka yang melibatkan enam orang yang terdiri dari pihak asing maupun internal Turki membuktikan bahwa proses kerja sama industri pertahanan sangat rentan kegiatan kebocoran data dan aksi spionase yang sangat merugikan negara. Celah para tersangka penjual informasi rahasia ini dilakukan pada saat memang Turki sedang mengembangkan kemampuan militer dan industri pertahanannya secara global, maka kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum dan mengambil keuntungan akan sangat terbuka lebar. Sehingga, unsur pengawasan dan kontrol dari pemerintah Turki harus ditingkatkan dan dikembangkan.

### 3

### DAMPAK

Dampak dari kejadian ini, sudah sangat mungkin pemerintah Turki akan meningkatkan dan menguatkan pengamanan terhadap berbagai kerja sama industri pertahanan khususnya terkait spesifikasi, komponen, bahan baku, kebutuhan dan lain-lain baik dengan asing maupun lokal, terutama terkait dengan masing-masing individu dalam menerbitkan *security clearance* sesuai hukum Turki. Sehingga proses birokrasi dan administrasi keamanan ini rentan menimbulkan hambatan dalam proses kerja sama pertahanan antara Turki dan negara mitra, termasuk Indonesia.

### 4

### SARAN

1. Kemhan mendorong Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, KKIP, dan Baranahan mendorong klausul keamanan lebih ketat dalam kerja sama industri pertahanan baik dengan negara asing maupun dalam negeri terutama terkait *security clearance* guna menjamin kerahasiaan dalam setiap kebutuhan program pertahanan.